

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah berkembangnya era digital dan keterbukaan informasi publik, kebutuhan akan sistem komunikasi pemerintahan yang transparan, informatif, dan partisipatif menjadi semakin penting (Fitriani et al., 2025). Masyarakat saat ini tidak lagi pasif terhadap isu-isu pemerintahan, tetapi memiliki ekspektasi tinggi terhadap keterlibatan dan akuntabilitas dari lembaga publik, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga legislatif daerah seperti DPRD Kabupaten Banyumas memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam hal legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga dalam menyampaikan informasi secara aktif dan efektif kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, badan legislatif daerah diwajibkan untuk mengelola komunikasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam konteks ini, humas memainkan peran strategis sebagai bagian dari *Government Public Relations* (GPR) yang menjembatani hubungan antara organisasi dengan masyarakat. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi tentang kegiatan dan kebijakan organisasi, tetapi juga berperan dalam membangun citra organisasi, mempertahankan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan akurat (Nurlaila et al., 2025).

Dalam konteks lembaga legislatif daerah, fungsi kehumasan dijalankan melalui berbagai aktivitas komunikasi, seperti dokumentasi kegiatan, pengelolaan informasi kelembagaan, serta publikasi melalui media resmi. Oleh karena itu, keberadaan kehumasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi dan akuntabilitas publik, sekaligus

menjadi ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa melalui pelaksanaan kegiatan kerja magang.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik kehumasan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan media digital dan dokumentasi visual sebagai sarana utama komunikasi publik. Media digital memungkinkan institusi pemerintah menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan interaktif, sementara dokumentasi visual berperan dalam memperkuat pesan serta meningkatkan pemahaman publik terhadap aktivitas kelembagaan. Dalam konteks humas pemerintah, dokumentasi kegiatan yang disajikan melalui media digital, seperti media sosial dan situs resmi, menjadi bentuk representasi kinerja institusi yang bersifat transparan dan akuntabel. Pemanfaatan media digital dalam kehumasan juga mendorong terciptanya hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga komunikasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga partisipatif (Kaplan & Haenlein, 2010).

Untuk memberikan landasan teoritis yang jelas terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktik kehumasan pemerintah, penulis memilih untuk melaksanakan kerja magang secara langsung di Sub Koordinator Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Lokasi ini dipilih karena unit kerja tersebut secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi kelembagaan, dokumentasi kegiatan, serta penyampaian informasi kepada publik, yang semuanya merupakan aspek penting dalam implementasi *Government Public Relations*. Keterlibatan langsung melalui program magang memungkinkan penulis mendapatkan pengalaman praktik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas komunikasi publik yang relevan dengan bidang ilmu komunikasi, sekaligus memperkuat pemahaman tentang peran kehumasan dalam konteks lembaga legislatif daerah.

Aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mencerminkan pelaksanaan strategi komunikasi publik yang bersifat dua arah. Salah satu tugas utama humas dalam konteks ini adalah melakukan dokumentasi terhadap berbagai kegiatan seperti rapat paripurna dan kunjungan kerja. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip internal, tetapi juga

menjadi sumber informasi visual yang nantinya disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi seperti media sosial, website resmi DPRD, atau bahkan siaran pers. Dokumentasi visual ini merupakan bentuk komunikasi visual yang memainkan peran penting dalam membentuk citra dan persepsi publik terhadap lembaga.

Dalam kerangka komunikasi organisasi, Kristina (2020) menyatakan bahwa keberhasilan organisasi, khususnya organisasi sektor publik, sangat bergantung pada efektivitas komunikasi organisasi yang dijalankan secara internal maupun eksternal. Melalui dokumentasi yang informatif dan terstruktur, humas mendukung kelancaran alur komunikasi lembaga serta membantu pelaksanaan tugas organisasi secara terkoordinasi. Komunikasi organisasi yang dikelola dengan baik mampu mendorong transparansi, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan.

Selain dokumentasi kegiatan, jobdesk lain yang dijalankan oleh Humas Sekretariat DPRD Banyumas adalah merancang dan mempublikasikan konten visual ucapan hari besar melalui media sosial Instagram. Aktivitas ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merepresentasikan identitas dan nilai-nilai yang dijunjung lembaga. Konten visual ucapan hari besar berfungsi sebagai bentuk komunikasi visual institusional dalam menyampaikan pesan-pesan kultural kepada masyarakat luas. Yulianti & Hasim (2025) menjelaskan bahwa konten visual memiliki peran penting dalam menarik perhatian audiens, memperkuat identitas visual, serta meningkatkan kesadaran dan preferensi publik terhadap suatu institusi.

Humas pemerintah memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan instansi dengan para pemangku kepentingan, sekaligus bertanggung jawab dalam membangun citra positif serta menjaga reputasi lembaga di ruang publik. Dalam konteks kehumasan pemerintahan, *Government Public Relations* (GPR) dipahami sebagai aktivitas komunikasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap tugas, fungsi, serta program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah (Rosmala et al., 2025).

Berdasarkan peran strategis tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kerja magang karena memiliki peran penting

dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan komunikasi pemerintahan. Sebagai lembaga yang bertugas memberikan dukungan administratif dan operasional kepada DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memiliki kebutuhan komunikasi yang tinggi, baik melalui pengelolaan informasi, kegiatan dokumentasi, maupun publikasi melalui media digital. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara langsung implementasi *Government Public Relations* dalam lingkungan pemerintahan daerah.

Dengan mengikuti kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas kehumasan tersebut. Kegiatan dokumentasi rapat, kunjungan kerja, serta notulensi rapat memungkinkan penulis memahami mekanisme kerja lembaga legislatif, alur komunikasi internal, serta cara penyampaian informasi yang sesuai dengan karakteristik audiens publik. Sementara itu, tugas pembuatan media visual memberikan pengalaman praktis dalam mengelola komunikasi visual yang efektif, menarik, dan sesuai dengan nilai-nilai kelembagaan.

Melalui pengalaman magang ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis humas dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan membangun komunikasi yang efektif antara DPRD Kabupaten Banyumas dengan masyarakat. Keterlibatan langsung dalam aktivitas kehumasan memberikan gambaran nyata mengenai implementasi komunikasi organisasi dan *government public relations* di lingkungan lembaga legislatif daerah. Pengalaman tersebut tidak hanya memperkaya wawasan praktis penulis, tetapi juga menjadi dasar reflektif untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi humas dijalankan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pembentukan kepercayaan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai aktivitas di industri komunikasi, khususnya dalam bidang Humas. Selain menjadi salah satu syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara, magang juga berfungsi sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan

praktis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki pengalaman langsung dalam dunia kerja. Secara lebih rinci, tujuan dari program magang ini meliputi:

1. Mengembangkan *hard skill* dalam bidang kehumasan, seperti manajemen media, keterampilan berbicara di depan publik, serta perencanaan strategi komunikasi.
2. Meningkatkan *soft skill*, termasuk kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, serta manajemen waktu
3. Mendapatkan pengalaman kerja yang nyata dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan praktik kerja magang terhitung mulai dari 3 Maret 2025 hingga 4 Juli 2025 di kantor DPRD Kabupaten Banyumas, yang berlokasi di Jl. Bung Karno No. 1, Purwokerto, Jawa Tengah dengan posisi Hubungan Masyarakat. Dengan total jam kerja yang sudah ditentukan dan wajib dipenuhi adalah sebanyak 640 jam kerja atau 80 hari kerja. Waktu pelaksanaan magang ini sudah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti pembekalan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UMN via zoom meeting.
- 2) Mengisi KRS internship di myumn.ac.id dengan syarat telah menempuh 110 sks dan tidak ada nilai D & E. Serta me-request transkrip nilai dari semester awal hingga semester akhir sebelum magang di www.gapura.umn.ac.id.
- 3) Memiliki kesempatan untuk mengajukan KM-01 lebih dari satu kali melalui pengisian Google Form untuk verifikasi tempat magang yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dalam bentuk KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Kepala Program Studi.

- 4) Mengisi dan submit form KM-01 pada myumn.ac.id jika sudah mendapat perusahaan atau lembaga yang sesuai.
- 5) Selanjutnya, mengunduh form KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Lembar Kehadiran Kerja Magang), KM-05 (Lembar Laporan Realisasi Kerja Magang), KM-06 (Penilaian Kerja Magang), KM-07 (Verifikasi Laporan Magang) untuk kebutuhan proses pembuatan laporan magang.

B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

- 1) Proses pengajuan praktik kerja magang dengan mengisi form data diri pada Google Form pada tanggal 21 Februari 2025 yang diberikan oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta mengunggah KM-02 (Surat Pengantar Magang) ke kooraktidalam form tersebut.
- 2) Proses penerimaan praktik kerja magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dengan menerima pesan keterima melalui akun *direct message* instagram resmi instansi pada tanggal 27 Februari 2025 dan mendapat surat penerimaan praktik kerja magang pada tanggal 3 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas.

C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

- 1) Praktik kerja magang dijalankan dengan posisi sebagai Hubungan Masyarakat.
- 2) Penugasan dan kebutuhan informasi, didampingi langsung oleh Kasubag Umum, Siti Mutmainah Fauziah selaku Pembimbing Lapangan.
- 3) Pengisian dan penandatanganan form KM-03 sampai KM-07 dilakukan pada saat proses praktik kerja magang berlangsung dan mengajukan lembar penilaian kerja magang (KM-06) kepada Pembimbing Lapangan pada akhir periode magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktik Kerja Magang

- 1) Pembuatan laporan praktik kerja magang dibimbing oleh Bapak Angga Ariestya selaku Dosen Pembimbing melalui *zoom meeting*.
- 2) Laporan praktik kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi.

- 3) Laporan praktik kerja magang yang telah disetujui diajukan untuk selanjutnya melalui proses sidang.

